



RINGKASAN EKSEKUTIF

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

2020-2024

**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-Royong**



DAFTAR ISI	2
BAB 1 ARAHAN UTAMA PRESIDEN	4
• Visi 2045	5
• Lima Arahkan Utama Presiden	6
» Pembangunan SDM	7
» Pembangunan Infrastruktur	12
» Penyederhanaan Regulasi	14
» Penyederhanaan Birokrasi	15
» Transformasi Ekonomi	16
BAB 2 EKONOMI MAKRO	20
• Target Pembangunan Nasional	24
• Target Pembangunan Wilayah	25
BAB 3 PENGEMBANGAN WILAYAH	26
• Pengembangan Kawasan Strategis	28
• Pengembangan Infrastruktur Wilayah	29
• Pengembangan Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan	32
• Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai Pendorong Pemerataan Wilayah	33
• Keterbatasan SDA dan Lingkungan (Tutupan Lahan)/ <i>Development Constraint</i>	34
• Kondisi Perlu / Prasyarat Pembangunan: Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan	35
BAB 4 KAIDAH PELAKSANAAN	36
BAB 5 PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (<i>MAJOR PROJECT</i>)	40

1

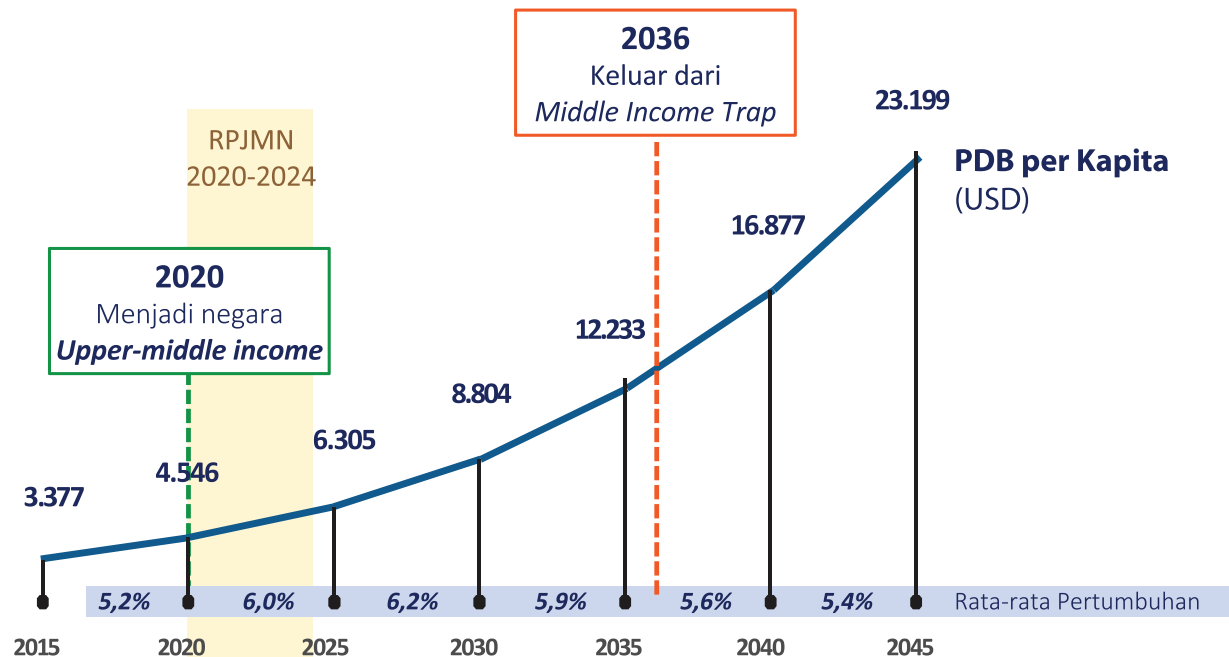
ARAHAN UTAMA PRESIDEN

- Visi 2045
- Lima Arahkan Utama Presiden
 - Pembangunan SDM
 - Pembangunan Infrastruktur
 - Penyederhanaan Regulasi
 - Penyederhanaan Birokrasi
 - Transformasi Ekonomi

VISI INDONESIA 2045

Indonesia
2045

Berdaulat, Maju,
Adil, dan Makmur



TRANSFORMASI EKONOMI harus dimulai pada tahun **2020-2024**
untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia maju

RATA-RATA PERTUMBUHAN 2015-2045:

PDB RIIL

5,7%

PDB RIIL
PER KAPITA

5,0%

TAHUN 2045:

NEGARA MAJU DAN
PDB TERBESAR

ke-5
(USD 7,4 triliun)

PERANAN KTI
MENJADI

25%



*Pencapaian visi 2045
melalui transformasi
ekonomi yang didukung oleh
hilirisasi industri dengan
memanfaatkan sumber
daya manusia, infrastruktur,
penyederhanaan regulasi, dan
reformasi birokrasi.*

5 Arahan Utama Presiden

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN MANUSIA



“Pembangunan Manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar pembangunan” :

Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, Produktivitas, serta Pembangunan Karakter

TUJUAN

Mewujudkan Manusia Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing

Sehat

Cerdas

Adaptif

Kreatif

Inovatif

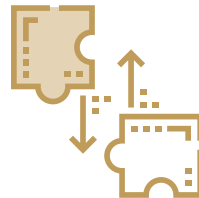
Terampil

Bermartabat



LAYANAN DASAR DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

1. Tata Kelola Kependudukan
2. Perlindungan Sosial
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Kualitas Anak, Perempuan Pemuda



PRODUKTIVITAS

1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2. Pendidikan Tinggi
3. Iptek dan Inovasi
4. Prestasi Olahraga



PEMBANGUNAN KARAKTER

1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
3. Moderasi Beragama
4. Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas



Pertumbuhan penduduk seimbang

PENYEDIAAN LAYANAN DASAR & PERLINDUNGAN SOSIAL



TATA KELOLA KEPENDUDUKAN

SASARAN 2024

100%

penduduk memiliki NIK, akte kelahiran, buku nikah, pencatatan perceraian, kematian serta penyebab kematian

STRATEGI

- Percepat cakupan administrasi kependudukan
- Integrasikan sistem administrasi kependudukan
- Integrasikan kebijakan pengendalian penduduk



PERLINDUNGAN SOSIAL

98%

penduduk mendapatkan perlindungan sosial

- Perkuat pelaksanaan jaminan sosial
- Perkuat pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran
- Terapkan perlindungan sosial yang adaptif
- Tingkatkan kesejahteraan sosial



PELAYANAN KESEHATAN

3%

Unmet need pelayanan kesehatan

- Tingkatkan kesehatan ibu dan anak, KB, dan kesehatan reproduksi
- Percepat perbaikan gizi masyarakat
- Tingkatkan pengendalian penyakit
- Budayakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- Perkuat Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan



LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

SASARAN 2024

9,18

tahun rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas

STRATEGI

- Tingkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran
- Perkuat akses pendidikan semua jenjang dan percepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
- Tingkatkan pengelolaan dan penempatan pendidik
- Perkuat penjaminan mutu pendidikan
- Tingkatkan tata kelola dan efektivitas pembiayaan pendidikan



PENGENTASAN KEMISKINAN

40%

rumah tangga miskin dan rentan memiliki aset produktif

- Perkuat ekonomi keluarga yang dipercepat
- Tingkatkan keperantaraan usaha dan dampak sosial
- Adakan reforma agraria
- Perbarukan kawasan hutan untuk masyarakat



KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA

81,5

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA)

- Wujudkan Indonesia layak anak dengan penguatan sistem perlindungan anak
- Tingkatkan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang
- Tingkatkan kualitas pemuda

PEMBANGUNAN SDM

*Menuju SDM yang terampil,
berkualitas, menguasai IPTEK
dan berprestasi.*



MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING

PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN VOKASI
BERBASIS KERJASAMA
INDUSTRI

SASARAN 2024

52,1%

angkatan kerja
berpendidikan
menengah ke atas



STRATEGI

- Tingkatkan kerja sama industri/swasta
- Adakan reformasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi
- Tingkatkan kualitas dan kompetensi pendidik
- Perkuat sistem sertifikasi kompetensi vokasi,
- Tingkatkan tata kelola vokasi

PENDIDIKAN TINGGI
BERKUALITAS

80%

lulusan Perguruan
Tinggi langsung
bekerja



- Kembangkan perguruan tinggi sebagai produsen IPTEK-inovasi dan pusat keunggulan
- Kembangkan kerja sama perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah
- Tingkatkan kualitas dan pemanfaatan penelitian
- Tingkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi
- Kembangkan dana abadi
- Kuatkan pembinaan perguruan tinggi swasta
- Kuatkan otonomi Perguruan Tinggi Negeri - Badan Hukum (PTN-BH)

KAPABILITAS IPTEK
DAN INOVASI

**40 hasil
inovasi**

Prioritas Riset
Nasional



- Manfaatkan IPTEK dan inovasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
- Kembangkan *Research Power-House*
- Ciptakan ekosistem inovasi
- Tingkatkan jumlah dan kualitas belanja litbang
- Tingkatkan jumlah dan kualitas SDM IPTEK

BUDAYA DAN
PRESTASI OLAHRAGA

**3 Medali
Emas**

baik *Olympic Games*
maupun *Paralympic Games*
Tahun 2024



- Kembangkan budaya olahraga
- Perbaiki sistem pembinaan berjenjang berbasis olimpiade dan potensi daerah
- Perbaiki tata kelembagaan
- Tingkatkan ketersediaan tenaga, serta prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional
- Kembangkan peran dunia usaha

Membangun SDM dengan Meningkatkan Vocational Training dan Vocational School



SASARAN 2024

-2017-
0,7 Juta
orang

2 Juta
Orang
-2024-



Lulusan pendidikan
dan pelatihan vokasi
bersertifikat kompetensi

-2018-
39,6%

50%
-2024-



Pekerja pada Bidang
Keahlian Menengah
dan Tinggi

STRATEGI

KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI DENGAN INDUSTRI/SWASTA

- Perkuat pemetaan kebutuhan keahlian termasuk informasi pasar kerja
- Terapkan pengurangan pajak untuk mendorong peran industri atau swasta
- Tingkatkan peran daerah

REFORMASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI






- Selaraskan kurikulum dan pola pembelajaran standar industri
- Perkuat vokasi sistem ganda, pembelajaran bahasa asing, *soft skills* dan karakter kerja
- Perkuat kecakapan kerja, kewirausahaan, dan permagangan
- Libatkan instruktur/praktisi kompeten dari industri
- Perkuat standar kompetensi sesuai kebutuhan industri
- Perkuat kelembagaan, kapasitas pelaksanaan, dan sistem sertifikasi profesi

TATA KELOLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

- Laksanakan pengendalian pendirian satuan pendidikan/program studi tidak sesuai kebutuhan dan standar mutu
- Tingkatkan akreditasi
- Bentuk Komite Vokasi
- Kembangkan skema pendanaan peningkatan keahlian
- Terapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi
- Tingkatkan akses pelatihan vokasi melalui Kartu Pra-Kerja

PEMBANGUNAN KARAKTER MELALUI REVOLUSI MENTAL DAN KEBUDAYAAN

SASARAN 2024

INDIKATOR	BASELINE	TARGET 2024	INDIKATOR	BASELINE	TARGET 2024
 Indeks Pembangunan Masyarakat	0,59 (2016)	↑	 Indeks Pembangunan Keluarga	53,6 (2018)	57,6
 Indeks Pembangunan Kebudayaan	53,7 (2018)	↑	 Median Usia Kawin Pertama Perempuan	21,8 (2017)	22,1
 Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,8 (2019)	↑			

STRATEGI



REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

- Terapkan revolusi mental dalam sistem pendidikan, sistem sosial keluarga dan masyarakat serta tata kelola pemerintahan.
- Tingkatkan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara



PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN

- Tingkatkan revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal
- Perluas pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya
- Perluas perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya



MODERASI BERAGAMA

- Perkuat cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah
- Perkuat harmoni dan kerukunan umat beragama
- Tingkatkan penyelarasan relasi agama dan budaya



LITERASI, INOVASI, DAN KREATIVITAS

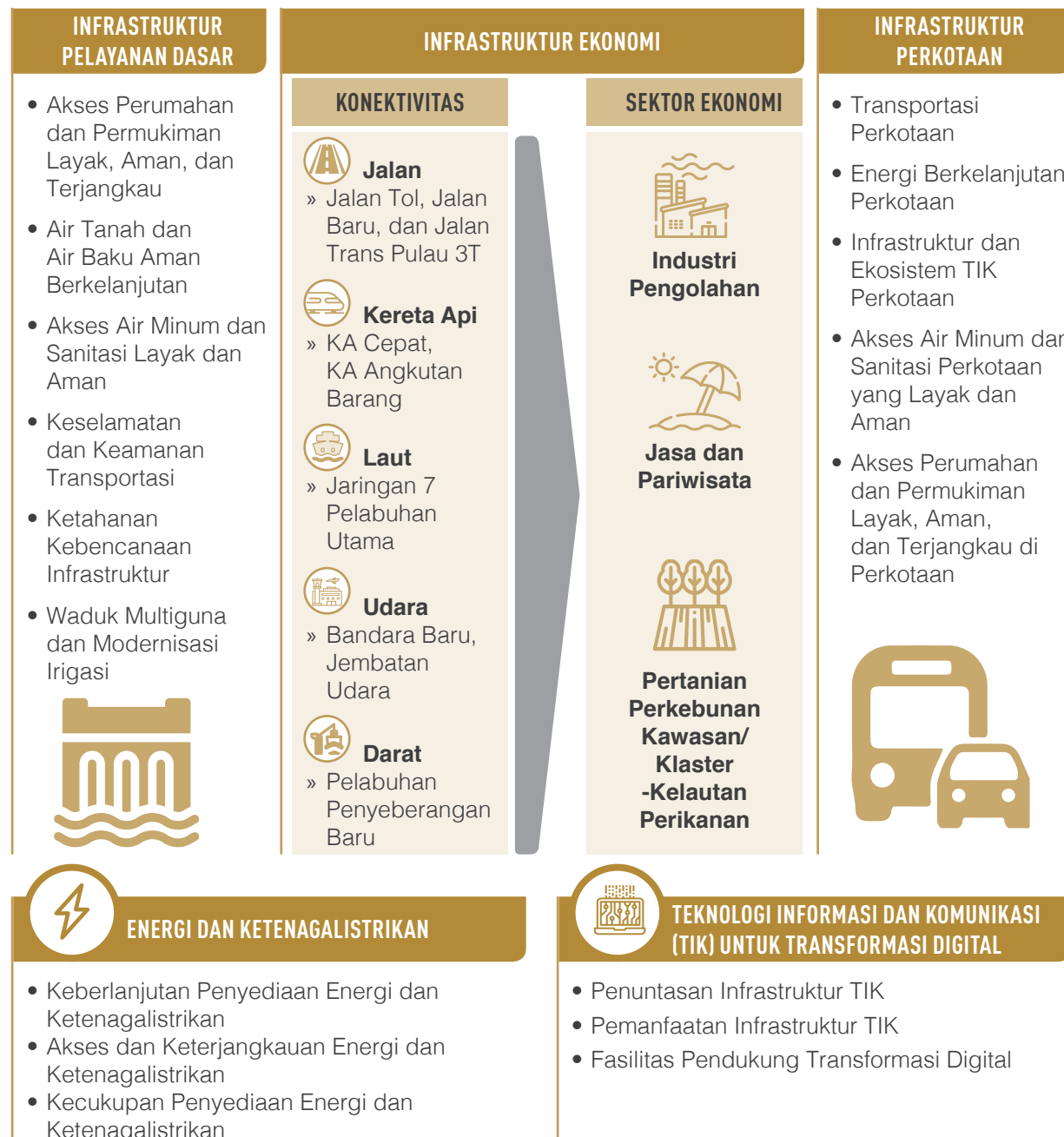
- Tingkatkan budaya literasi
- Perluas pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra
- Perluas pengembangan budaya IPTEK, inovasi, kreativitas, dan daya cipta

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.



STRATEGI INFRASTRUKTUR 2020-2024



SASARAN INFRASTRUKTUR 2020-2024



INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR



70%

Rumah Tangga Menempati Hunian Layak



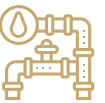
100%

Hunian dengan Akses Air Minum Layak » Termasuk Akses Aman 15%



90%

Hunian dengan Akses Sanitasi Layak » Termasuk Akses Aman 20%



24 Juta

Sambungan Rumah dengan Akses Air Minum Layak Perpipaan



550 Ribu ha

Jaringan Irigasi Baru



50 m3/detik

Tambahan Air Baku Industri & Domestik



60

Bendungan Multiguna Baru



3 m³/kg

Produktivitas Air untuk Padi



20 Provinsi

berisiko bencana tinggi mengalami peningkatan ketahanan bencana



INFRASTRUKTUR EKONOMI



KA Cepat Pulau Jawa

Jakarta-Semarang & Jakarta-Bandung



KA Angkutan Barang

Makassar - Parepare



7 Pelabuhan Utama

Meningkatkan Standarisasi Kinerja dan Pengelolaan Pelabuhan Terpadu



115 Rute Jembatan Udara



2.500 km

Jalan Tol Baru dan/atau Beroperasi



3.000 km

Jalan Nasional Baru



98%

Kondisi Mantap Jalan Nasional



1,9 jam/100 km

Waktu Tempuh pada Jalan Lintas Utama Pulau



27%

Rute Pelayaran yang Saling Terhubung (*loop*)



INFRASTRUKTUR PERKOTAAN



Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di **6 Wilayah Metropolitan**



80% Penanganan 20% Pengurangan

Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik



TRANSFORMASI DIGITAL



50%

Kapasitas Palapa Ring



95%

Desa Terjangkau Infrastruktur Jaringan Bergerak Pita Lebar



60% Kecamatan

Cakupan Jaringan Serat Optik



80%

Populasi Terjangkau Siaran Digital

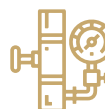


3

Start Up Unicorn Baru



ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN



4 Juta

Sambungan Rumah Baru Jaringan Gas Kota



1.300 kWh

Konsumsi Listrik Per Kapita Nasional



3,5 Juta Ton

Penurunan Emisi CO₂ Pembangkit

PENYEDERHANAAN REGULASI

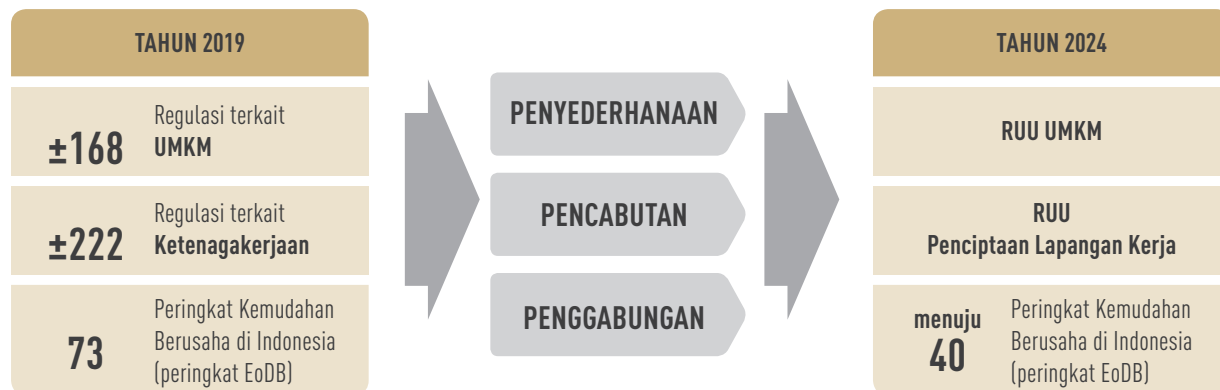
Menyederhanakan kendala regulasi. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar dengan pendekatan Omnibus Law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.



PENDEKATAN OMNIBUS LAW

Penerapan pendekatan **Omnibus Law**

(Penggabungan Beberapa Ketentuan Undang-Undang kedalam satu Undang-Undang dengan Membatalkan Undang-Undang Sebelumnya)



PENDEKATAN TERHADAP REGULASI YANG AKAN DISUSUN

ANALISIS DAMPAK REGULASI/REGULATORY IMPACT ANALYSIS (RIA)
ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT (COST AND BENEFIT ANALYSIS/CBA)



Mengurangi tumpang tindih regulasi
(membentuk 1 regulasi baru dengan mencabut 2 aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama)



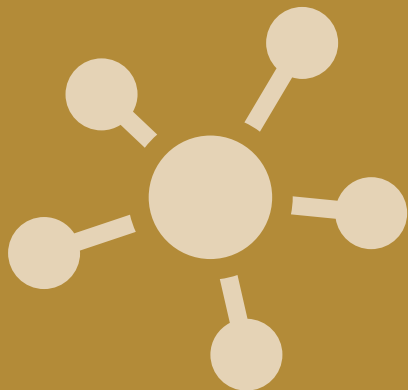
Regulasi yang berorientasi tujuan



Perubahan paradigma pembentukan peraturan "semua boleh kecuali yang dilarang"
(untuk menumbuhkan inovasi)

PENYEDERHANAAN BIROKRASI

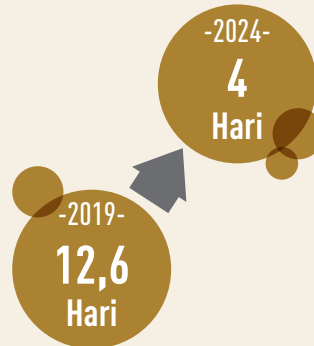
Menyederhanakan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.



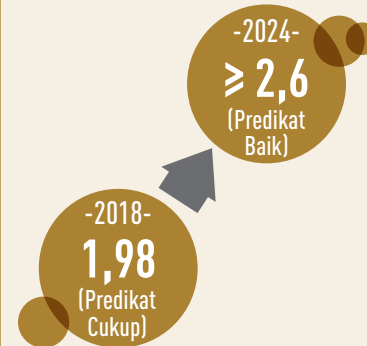
KEMUDAHAN PERIZINAN DAN INVESTASI

SASARAN 2024

Waktu Memulai Usaha
(EoDB)

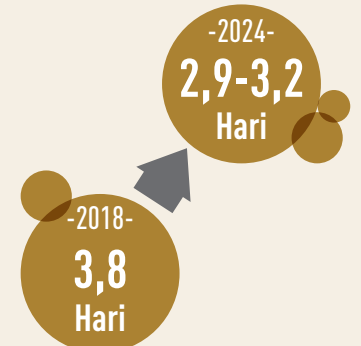


Peningkatan Indeks Maturitas
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)
predikat Baik



*Indeks Maturitas SPBE menggambarkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi dan layanan publik pemerintah

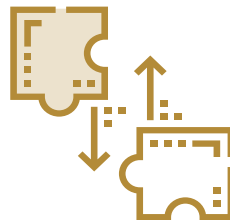
Percepatan waktu rata-rata
pengeluaran barang
(dwelling time)



HIGHLIGHT KEBIJAKAN

PENYEDERHANAAN PROSEDUR

(11.2 PROSEDUR MENJADI 5
PROSEDUR)



PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

(SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK / SPBE)



REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK KEGIATAN EKSPOR/ IMPOR, KEPABEANAN, DAN KEPELABUHAN



TRANSFORMASI EKONOMI

Bertransformasi dari ketergantungan pada SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial



TUJUAN

Mendorong industri pengolahan dan jasa modern bernilai tambah tinggi sebagai penggerak utama ekonomi

19,9% (2018)

21,0% (2024)

Kontribusi PDB industri pengolahan

17,6% (2018)

18,8% (2024)

Kontribusi PDB industri pengolahan non migas



14,7% (2018)

15,7% (2024)

Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja



USD 19,3 miliar (2018)

USD 32 miliar (2024)

Devisa pariwisata



Rp1.105 triliun (2018)

Rp1.689 triliun (2024)

Nilai tambah ekonomi kreatif

Rp146 triliun (2018)

Rp600 triliun (2024)

Nilai transaksi *e-commerce*



STRATEGI



INDUSTRIALISASI

Industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global



PENGEMBANGAN DESTINASI UNGGULAN

Pengembangan Destinasi Unggulan, melalui: perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas di Destinasi Pariwisata Prioritas



PENGUATAN EKONOMI KREATIF DAN EKONOMI DIGITAL

Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, pada sektor: kuliner, fesyen, kriya, aplikasi dan konten digital, *games*, film, dan musik.

SASARAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH DALAM RANGKA TRANSFORMASI EKONOMI



1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.



2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

SASARAN 2024



KETAHANAN ENERGI

- **19,5%** Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional
- Pengembangan bahan bakar nabati s.d **B100**
- Produksi gas alam **1,2 juta SBM/hari**



KETAHANAN AIR

- **89 juta ha** minimal kawasan lindung nasional
- **550.000 ha** jaringan irigasi baru
- Penyelesaian **60 bendungan**



KETAHANAN PANGAN

- Skor Pola Pangan Harapan **95,2**
- Ketersediaan beras **37,13 juta ton**
- Ketersediaan protein hewani **2,88 juta ton**



KEMARITIMAN DAN PERIKANAN

- **26,9 juta ha** kawasan konservasi laut/perairan
- Penataan **85 ruang laut** dan **zonasi pesisir**
- Produksi ikan **20,4 juta ton**



KEWIRAUSAHAAN, UMKM & KOPERASI

- Pertumbuhan wirausaha baru **4%**
- Rasio Kredit UMKM **22%**
- **5,5%** kontribusi PDB koperasi



NILAI TAMBAH, LAPANGAN KERJA, INVESTASI DAN INDUSTRIALISASI

- Pertumbuhan PDB industri pengolahan **6,5%**
- Pertumbuhan PDB pertanian **3,9%**
- Kontribusi PDB kemaritiman **7,8%**
- Pengembangan *Be Creative District*
- Kontribusi ekonomi digital **4,7%**
- Nilai realisasi PMA dan PMDN **Rp1.500,0 triliun**
- Lapangan kerja **2,7-3 juta** orang per tahun



EKSPOR DAN TKDN

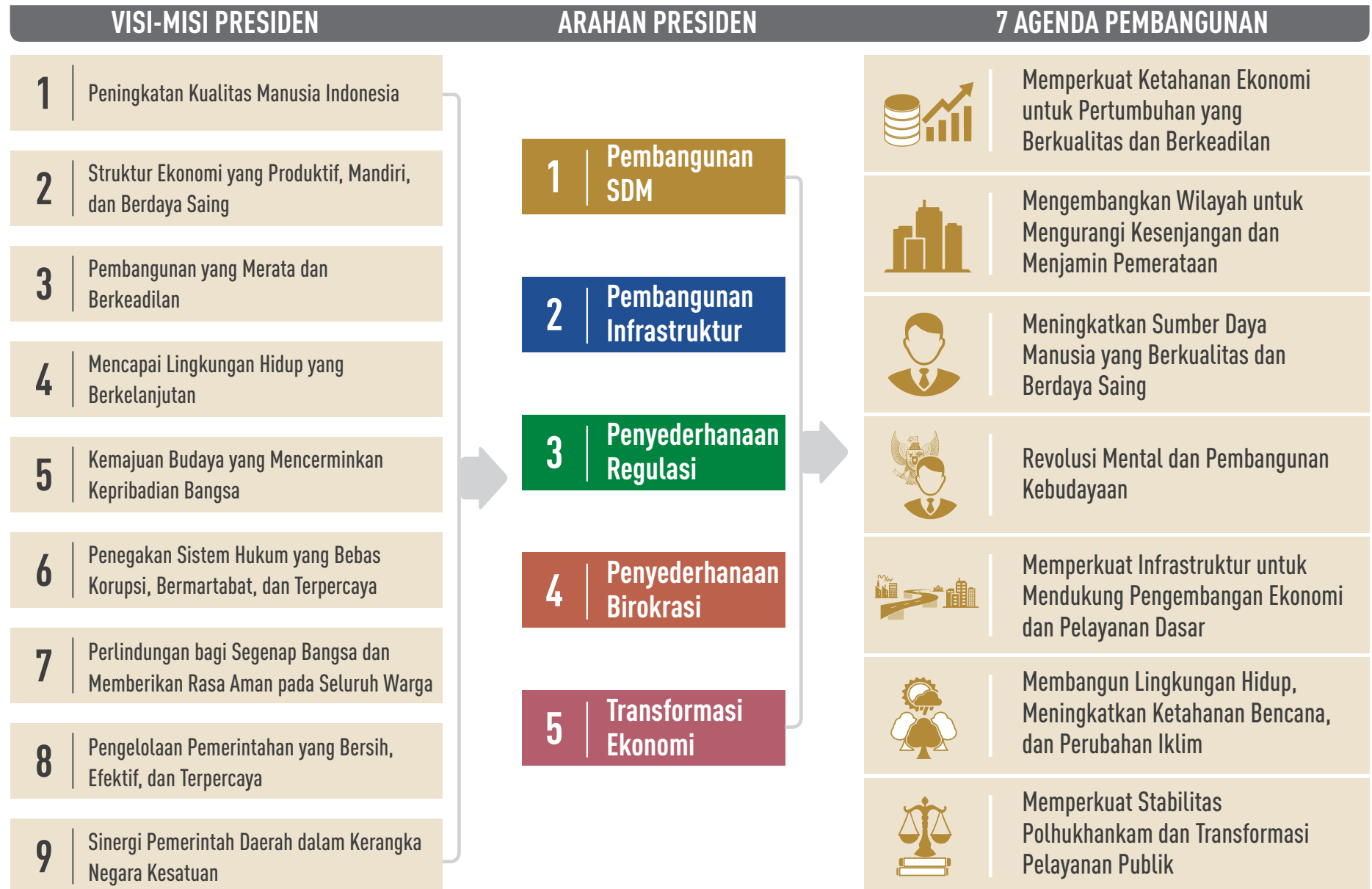
- Pertumbuhan ekspor barang dan jasa **4,8%**
- Surplus neraca perdagangan **USD 5,6 miliar**
- Devisa pariwisata **USD 32 miliar**
- Wisatawan mancanegara **24 juta** orang
- Nilai ekspor ekonomi kreatif **USD 24,5 miliar**
- Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) **50%**



PENGUATAN PILAR PERTUMBUHAN

- Biaya logistik **20%** PDB
- Efektivitas dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah
- **210** produk inovasi yang dimanfaatkan oleh industri/badan usaha

Visi-Misi dan arahan presiden yang terdiri dari **Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi** diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024





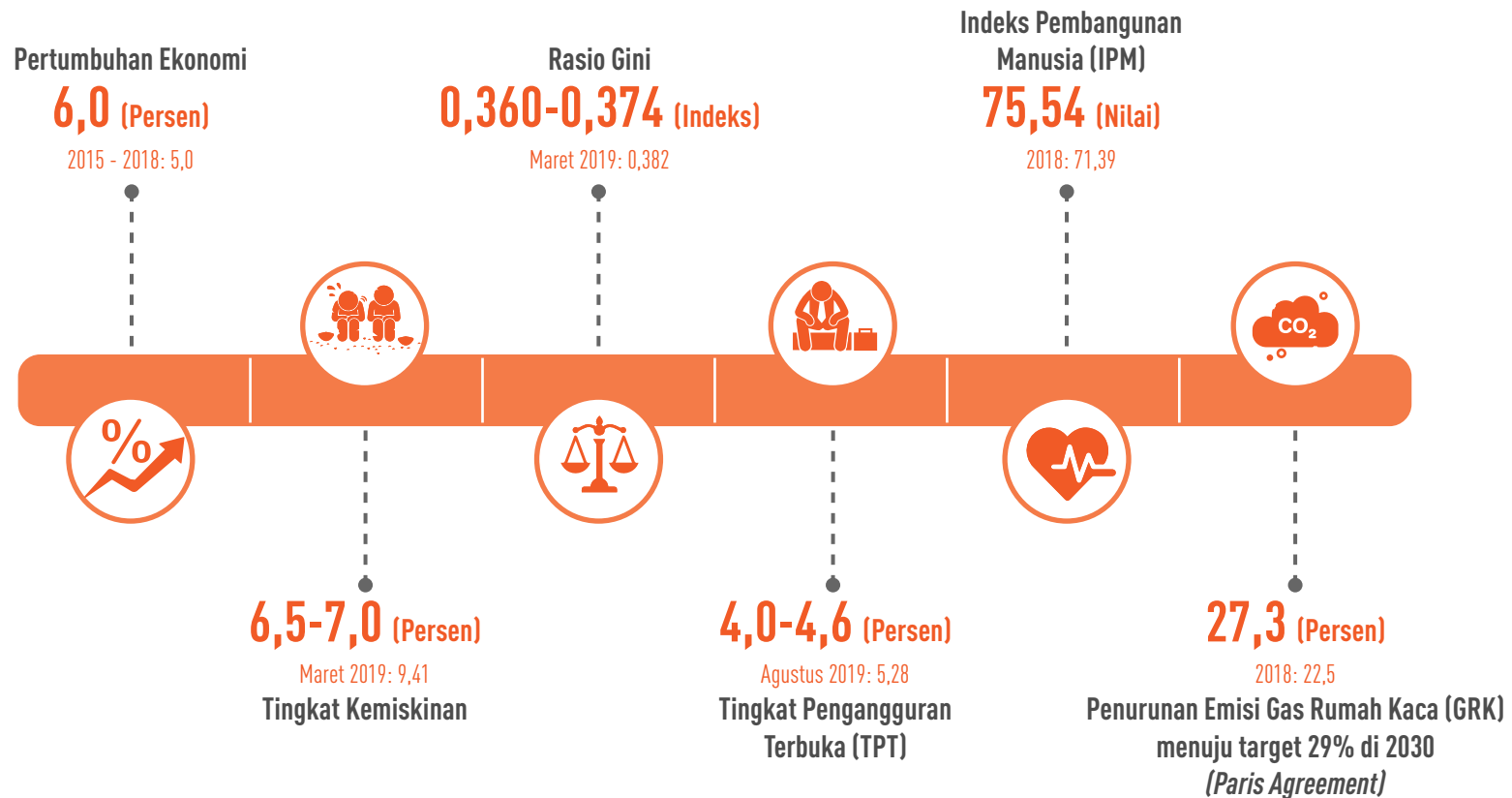
2

EKONOMI MAKRO

- Target Pembangunan Nasional
- Target Pembangunan Wilayah

SASARAN PEMBANGUNAN 2020-2024 - MENCAPAI PERTUMBUHAN BERKUALITAS/INKLUSIF

Meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi.



SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI 2020-2024

Ekonomi Indonesia harus tumbuh tinggi di periode 2020-2024, agar dapat menuju Negara Berpendapatan Tinggi di Tahun 2036.

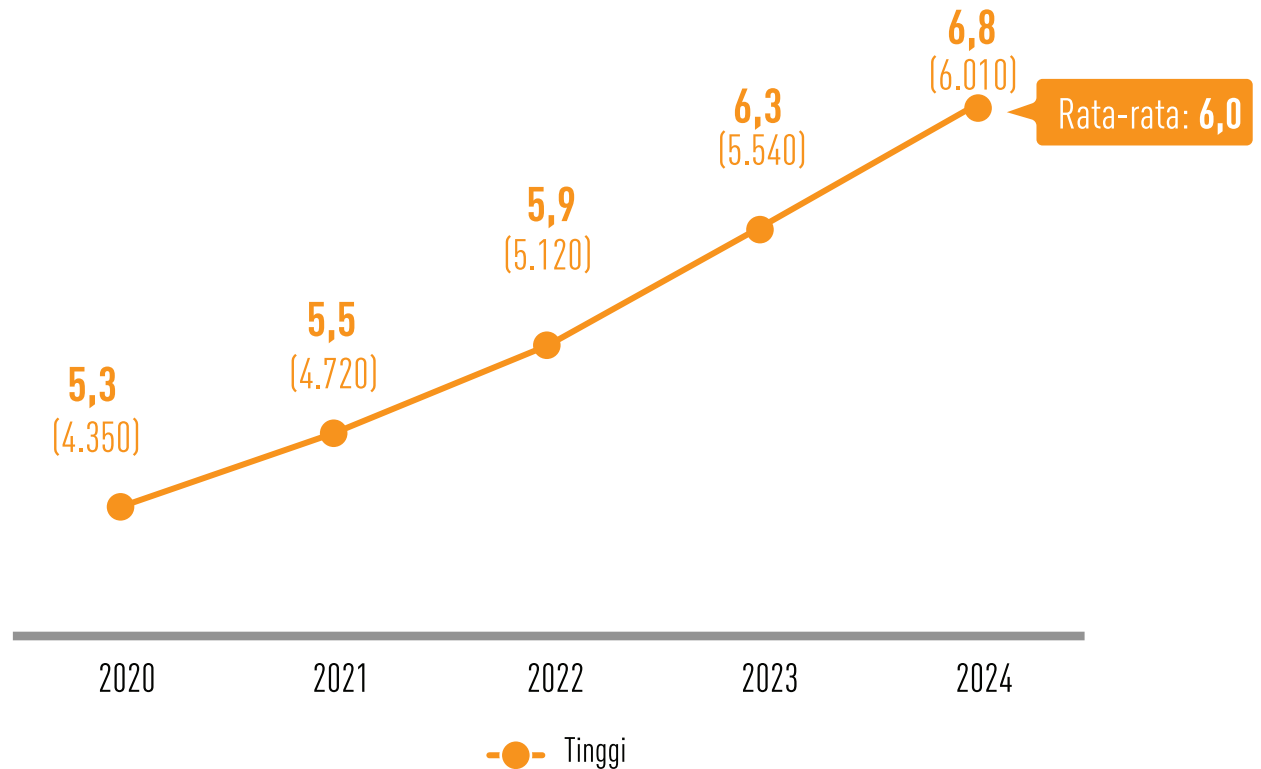


KUNCI PENINGKATAN PERTUMBUHAN¹:

1. Perbaikan kualitas SDM
2. Peningkatan investasi
3. Peningkatan produktivitas
4. Perbaikan pasar tenaga kerja

PERTUMBUHAN EKONOMI - PERSEN

(GNI Per Kapita – USD Harga Berlaku *Atlas Method*²)

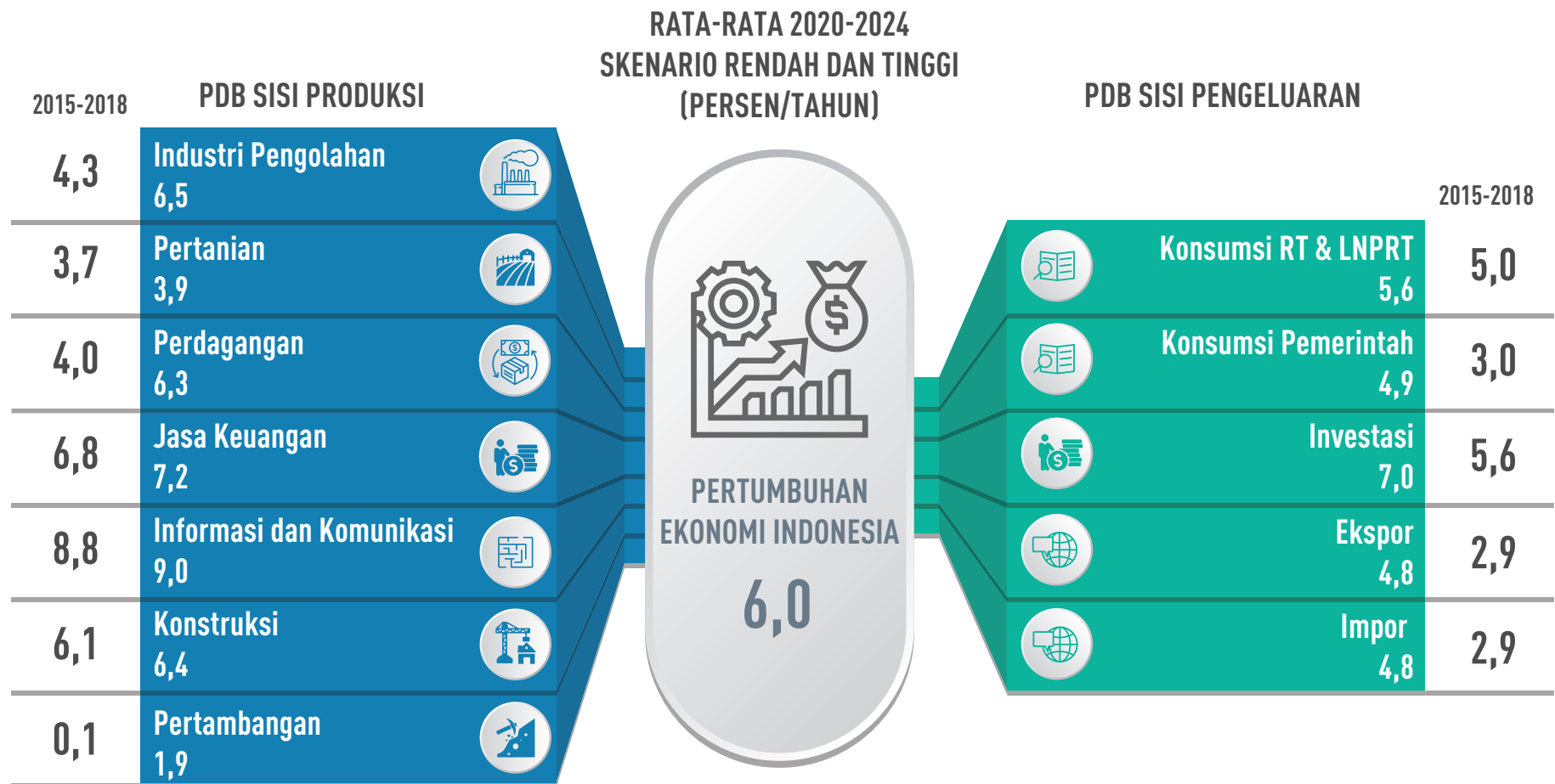


1. Berdasarkan simulasi Bappenas September 2019 (Angka Sementara) dengan metode Growth Accounting

2. Metode yang digunakan oleh Bank Dunia untuk mengelompokkan negara berdasarkan pendapatan

GAMBARAN PERTUMBUHAN EKONOMI 2020-2024

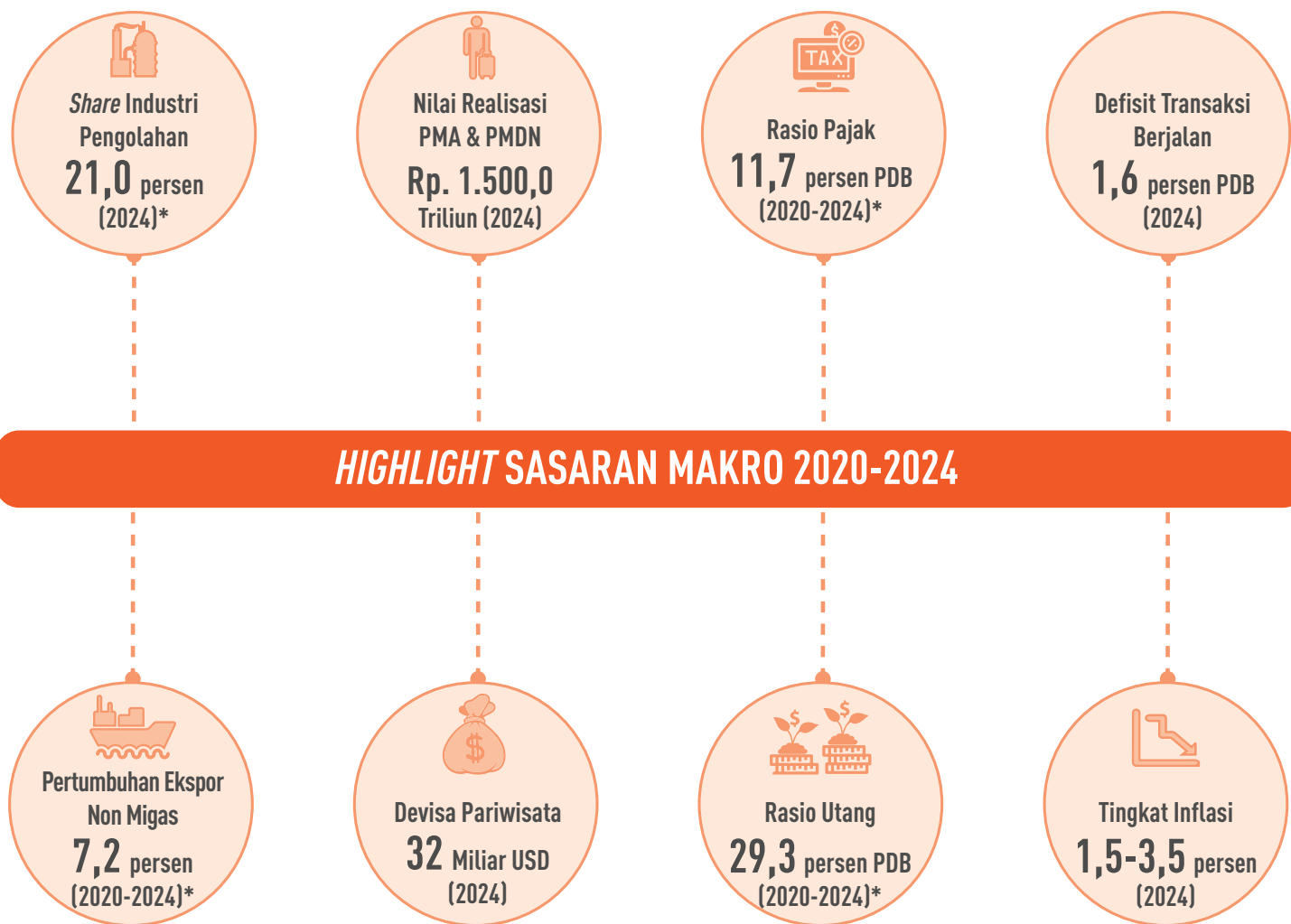
Sasaran pertumbuhan ekonomi dicapai melalui perbaikan transformasi struktural, penguatan permintaan domestik, dan diversifikasi ekspor.



Perhitungan Bappenas (sangat sementara)

SASARAN MAKRO PEMBANGUNAN 2020-2024

Pencapaian pertumbuhan yang inklusif didukung oleh penguatan struktur ekonomi dan stabilitas makro.



*Rata-rata 2020-2024

SASARAN PEMBANGUNAN BERBASIS KEWILAYAHAN



1. Meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa - luar Jawa)



2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah



3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah



4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah

TARGET PEMBANGUNAN BERBASIS KEWILAYAHAN

SKENARIO TINGGI INDONESIA

2020: 5,3

2024: 6,8

KALIMANTAN

	Pertumbuhan	Share	PDRB per Kapita (Juta Rp)
2020	5,7%	8,4%	91,4
2024	8,3%	9,0%	133,5
Rata-rata	6,9%		

SULAWESI

	Pertumbuhan	Share	PDRB per Kapita (Juta Rp)
2020	6,9%	6,3%	56,7
2024	8,8%	6,6%	81,4
Rata-rata	7,8%		

MALUKU

	Pertumbuhan	Share	PDRB per Kapita (Juta Rp)
2020	6,2%	0,5%	31,2
2024	9,1%	0,6%	44,9
Rata-rata	7,6%		

SUMATERA

	Pertumbuhan	Share	PDRB per Kapita (Juta Rp)
2020	4,6%	21,5%	64,8
2024	6,4%	21,2%	86,9
Rata-rata	5,4%		

PAPUA

	Pertumbuhan	Share	PDRB per Kapita (Juta Rp)
2020	5,4%	1,9%	75,8
2024	6,4%	2,0%	106,7
Rata-rata	6,9%		

JAWA - BALI

	Pertumbuhan	Share	PDRB per Kapita (Juta Rp)
2020	5,6%	59,9%	68,5
2024	6,5%	59,1%	93,3
Rata-rata	6,0%		

NUSA TENGGARA

	Pertumbuhan	Share	PDRB per Kapita (Juta Rp)
2020	4,7%	1,5%	25,2
2024	7,5%	1,6%	35,9
Rata-rata	6,1%		

*angka proyeksi sangat sementara, setelah konsultasi regional RPJMN 2020-2024 dan penyesuaian realisasi triwulan III 2019

** supas 2015

Sumber: Perhitungan Bappenas

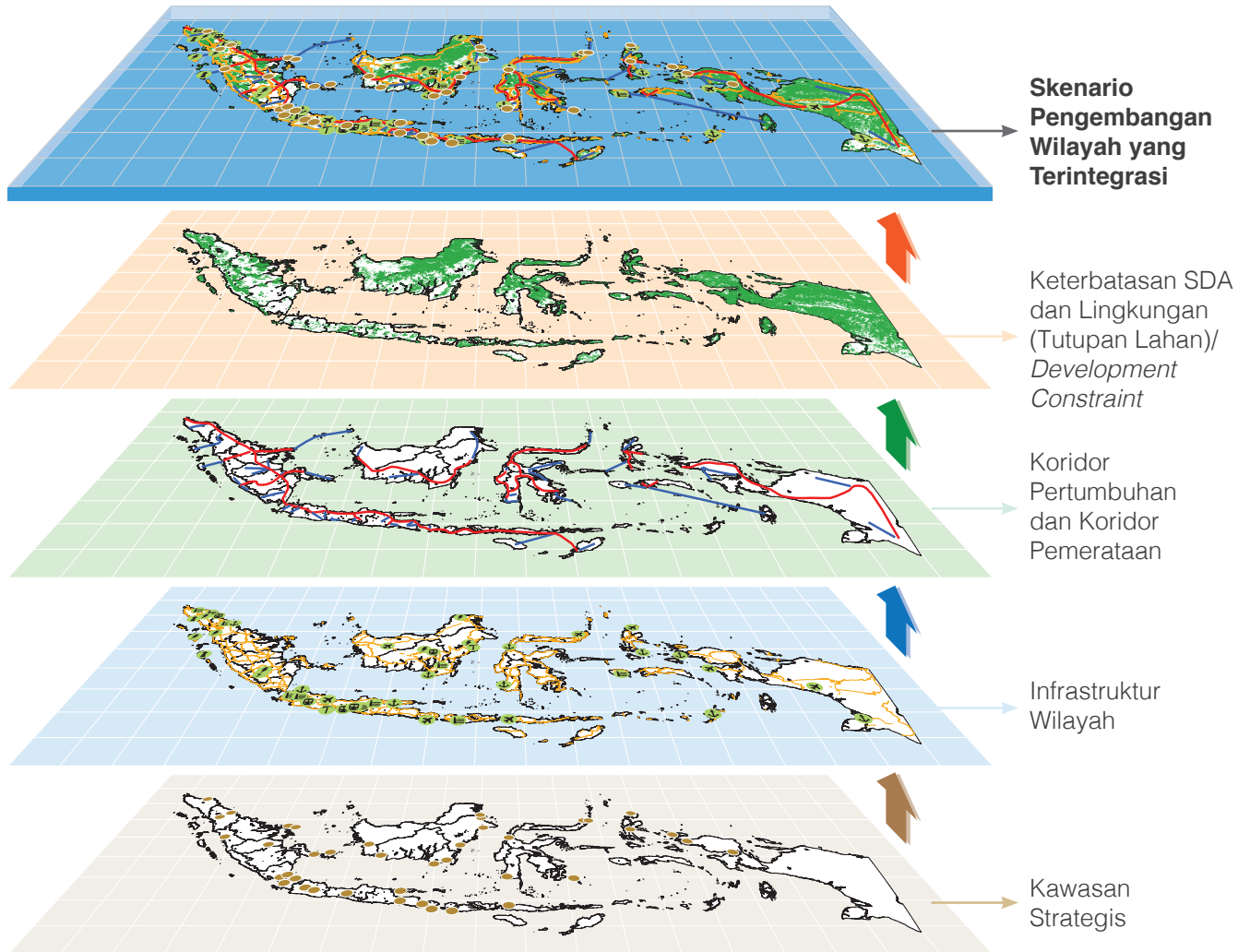
3

PENGEMBANGAN WILAYAH

- Pengembangan Kawasan Strategis
- Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- Pengembangan Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan
- Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai Pendorong Pemerataan Wilayah
- Keterbatasan SDA dan Lingkungan (Tutupan Lahan) / *Development Constraint*
- Kondisi Perlu / Prasyarat Pembangunan: Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

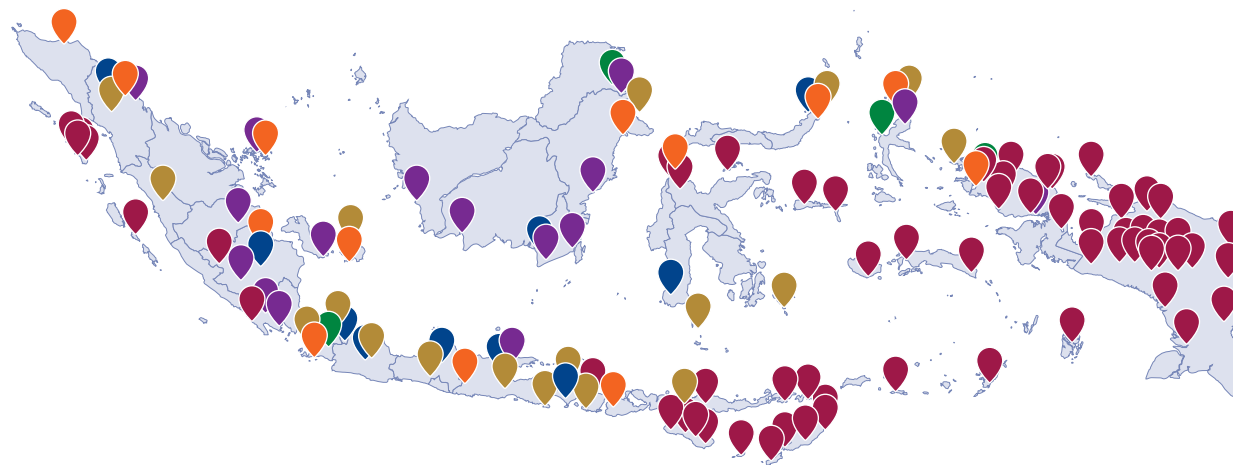
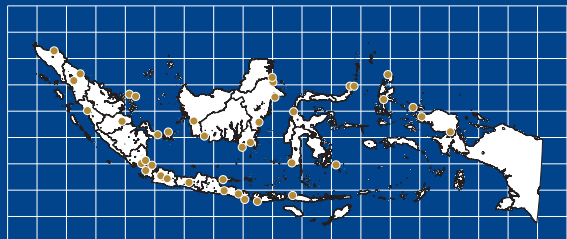
PENGEMBANGAN WILAYAH YANG TERINTEGRASI

Pengembangan wilayah merupakan alat untuk mengintegrasikan upaya-upaya pembangunan



“
Identifikasi *kawasan-kawasan strategis* yang didukung layanan *infrastruktur ekonomi* dan pelayanan dasar akan memberikan arahan terhadap *koridor pertumbuhan dan pemerataan* di suatu wilayah dengan mempertimbangkan *batasan pembangunan*”

PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS



PENGEMBANGAN WILAYAH METROPOLITAN



- Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar dan Manado

PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)



- 13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

PENGEMBANGAN DPP/KSPN/KPPN



- 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (22 KSPN)
- 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Baru (18 KSPN dan 11 KPPN)
- 1 Revitalisasi seluruh KSPN di Bali

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL



- 62 Kabupaten di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, NTT, NTB, Maluku Utara, Maluku

PENGEMBANGAN KOTA BARU



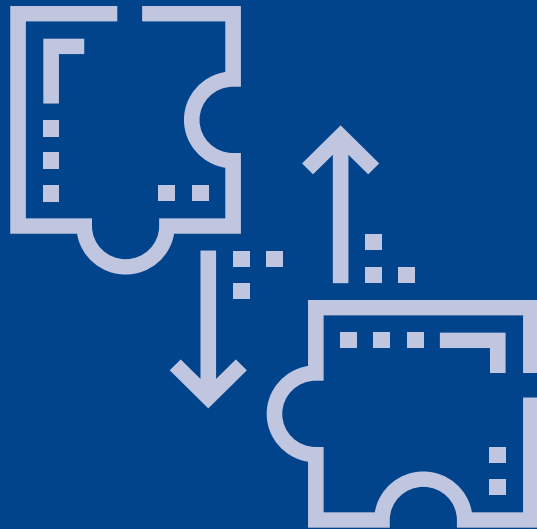
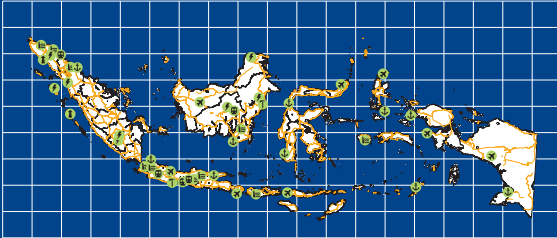
- Maja, Tanjung Selor, Sofifi dan Sorong

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI



- 9 KI Prioritas : Sei Mangkei, Bintan Aerospace, Galang Batang, Sadai, Ketapang, Surya Borneo, Buluminung, Teluk Weda dan Teluk Bintuni

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH



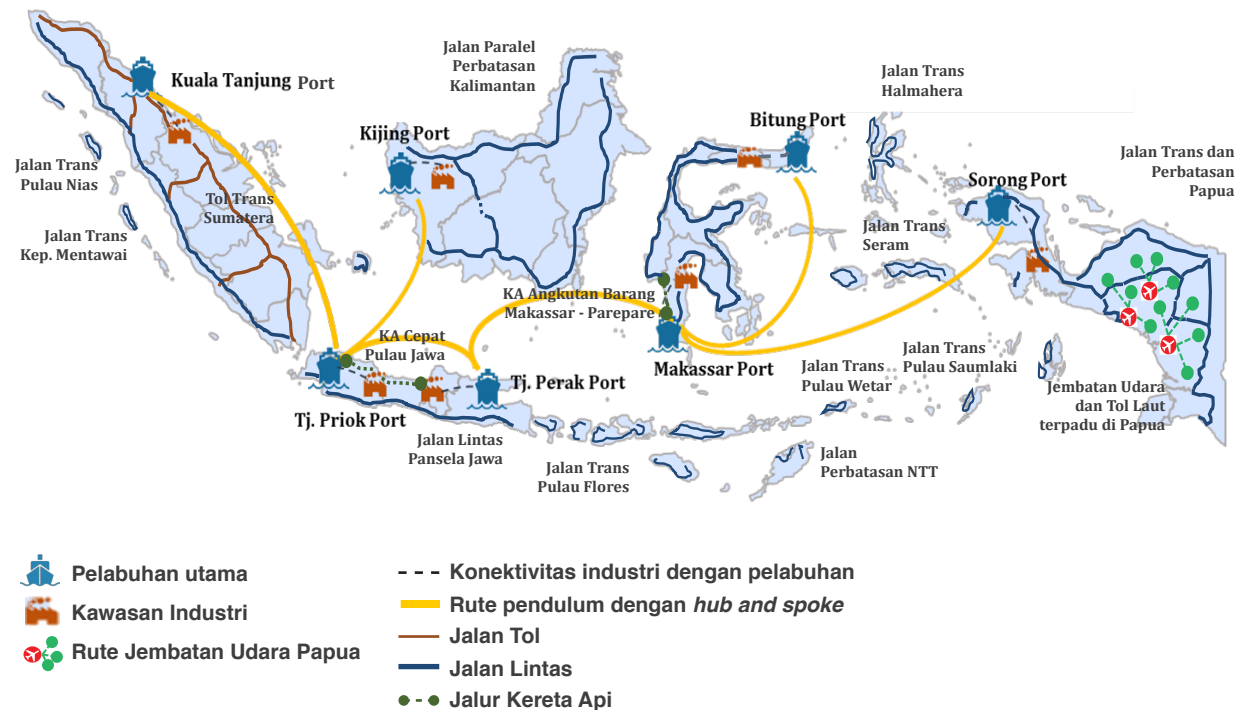
KONEKTIVITAS LOGISTIK

- *Integrated Port Network* akan menurunkan biaya logistik nasional sebesar 1,6%, memperbaiki konektivitas dan menyeimbangkan arus perdagangan antara Indonesia Barat dan Timur

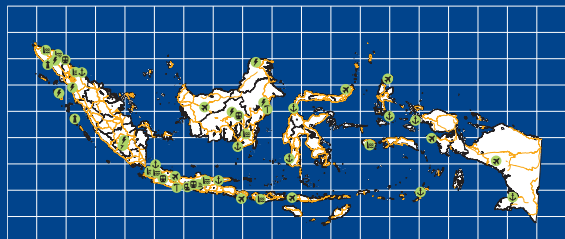


- Pengembangan Transportasi Multimoda (Jalan Tol, Jalan Lintas Utama, Kereta Api, Bandara)

PEMBANGUNAN 7 PELABUHAN UTAMA DAN TRANSPORTASI MULTIMODA TERPADU DENGAN PENGEMBANGAN KAWASAN



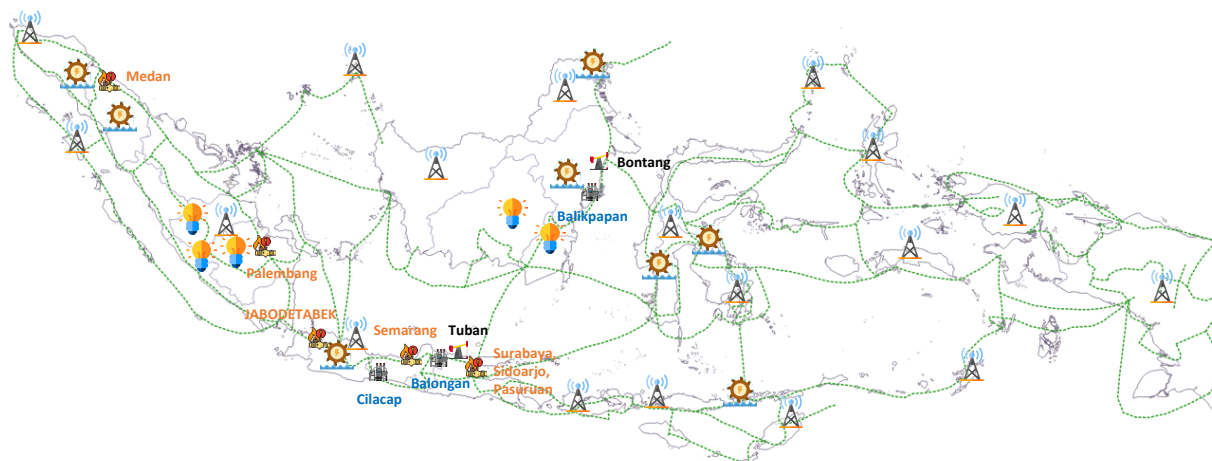
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH



INFRASTRUKTUR ENERGI DAN TIK

TUJUAN

- Mendorong pemerataan pembangunan melalui pengurangan kesenjangan digital dan pemenuhan kebutuhan energi
- Mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan internet cepat dan penyimpanan data serta peningkatan kualitas penyediaan energi



----- Jaringan Serat Optik
(mencakup 60% Kecamatan)



Jaringan Bergerak Pitalerak
(mencakup 95% Desa)



Penurunan Pemadaman Listrik
Terbesar 36 jam/Pelanggan



Pembangkit Listrik EBT



Jaringan Gas Kota

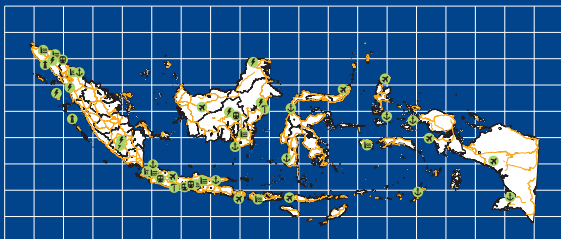


Revitalisasi Kilang Minyak



Pembangunan Kilang Minyak

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH



INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR

TUJUAN

Mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah di Indonesia melalui infrastruktur pelayanan dasar

SUMATERA



Hunian Layak

- Perumahan Layak 70 %



Pengelolaan Air

- 1,85 Juta SR air minum layak perpipaan



Sanitasi

- 89% akses sanitasi layak » akses sanitasi aman 15%



TPA Regional

- 82% terlayani penanganan sampah

KALIMANTAN



Hunian Layak

- Perumahan Layak 80 %



Pengelolaan Air

- 994 Ribu SR air minum layak perpipaan



Sanitasi

- 85% akses sanitasi layak » akses sanitasi aman 9%



TPA Regional

- 83% terlayani penanganan sampah

SULAWESI



Hunian Layak

- Perumahan Layak 77 %



Pengelolaan Air

- 620 Ribu SR air minum layak perpipaan



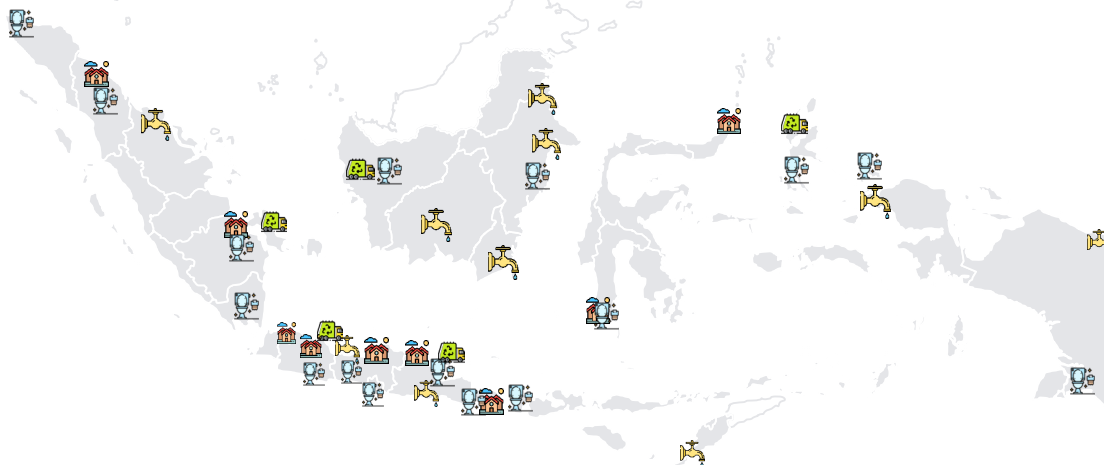
Sanitasi

- 99% akses sanitasi layak » akses sanitasi aman 16%



TPA Regional

- 88% terlayani penanganan sampah



JAWA dan BALI



Hunian Layak

- Perumahan Layak 72.5 %



Pengelolaan Air

- 6,01 Juta SR air minum layak perpipaan



Sanitasi

- 93% akses sanitasi layak » akses sanitasi aman 25%



TPA Regional

- 81% terlayani penanganan sampah

NUSA TENGGARA



Hunian Layak

- Perumahan Layak 68 %



Pengelolaan Air

- 303 Ribu SR air minum layak perpipaan



Sanitasi

- 82% akses sanitasi layak » akses sanitasi aman 10%



TPA Regional

- 57% terlayani penanganan sampah

MALUKU dan PAPUA



Hunian Layak

- Perumahan Layak 50 %



Pengelolaan Air

- 191 Ribu SR air minum layak perpipaan



Sanitasi

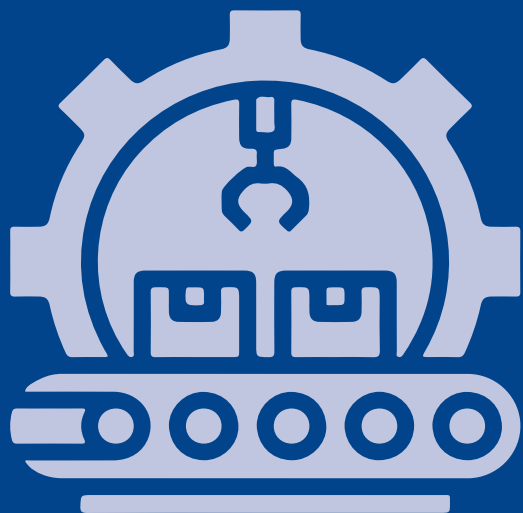
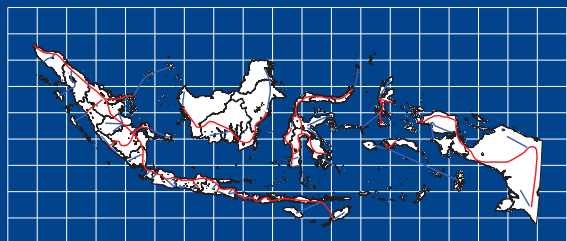
- 63% akses sanitasi layak » akses sanitasi aman 5%



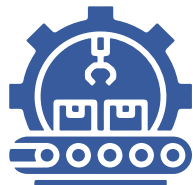
TPA Regional

- 83% terlayani penanganan sampah

PENGEMBANGAN KORIDOR PERTUMBUHAN DAN KORIDOR PEMERATAAN



- Konsep koridor dibangun berdasarkan pertampalan (*overlay*) dari:



Jalur **Manufaktur**
Nusantara



Jalur **Mineral**
Nusantara



Jalur **Pariwisata**
Nusantara



Pola **Persebaran**
Pusat Kegiatan
(PKN dan PKW)



- Pertampalan tersebut membentuk jalur pembangunan utama (**koridor pertumbuhan**) dan jalur pembangunan pendukung (**koridor pemerataan**).

KORIDOR PERTUMBUHAN

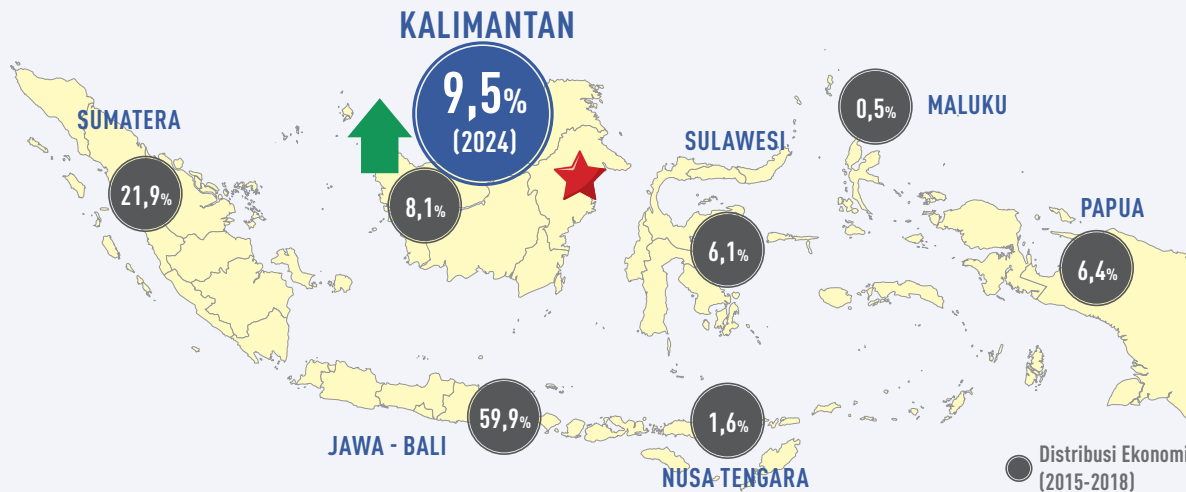
bertujuan untuk **memacu pertumbuhan** ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan (**PKN, PKW, KEK, KI, dan DPP/KSPN**)

KORIDOR PEMERATAAN

bertujuan untuk pemenuhan **pelayanan dasar** yang lebih **merata** melalui pengembangan **PKW dan PKL** sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru.

PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA (IKN) SEBAGAI PENDORONG PEMERATAAN WILAYAH

Pemindahan Ibu Kota Negara mendorong pemerataan ke luar Jawa dan mengubah pandangan pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris



KEUNGGULAN:

- Mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris ke Indonesia-sentris
- Memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah NKRI
- Mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia untuk pemerataan wilayah
- Ibu kota baru dengan kawasan hijau yang lebih dominan
- Mengurangi beban Pulau Jawa

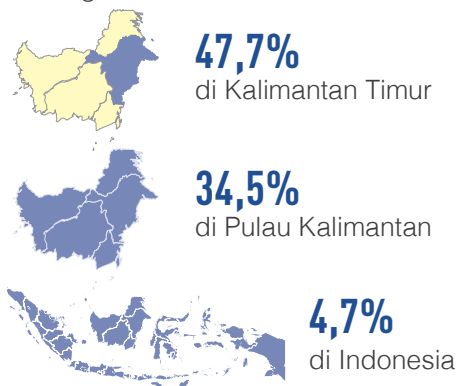
TANTANGAN:

- Memerlukan tahapan waktu dan komitmen jangka panjang dari pemerintah dan masyarakat Indonesia
- Berkurangnya area tutupan lahan

DAMPAK JANGKA PENDEK

Investasi infrastruktur akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dan sekitarnya.

Meningkatkan **Investasi Riil** sebesar:



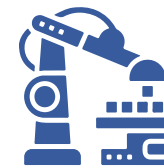
Sumber: perhitungan Bappenas

DAMPAK JANGKA PANJANG



PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Pemindahan Ibu Kota Negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi:



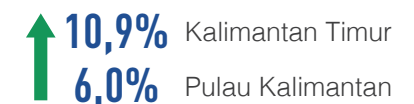
DIVERSIFIKASI EKONOMI

Akan terjadi peningkatan output sektor jasa di Provinsi Kaltim serta sektor non-tradisional (Industri, Hotel, Transportasi, Komunikasi) di Provinsi sekitarnya



PENURUNAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

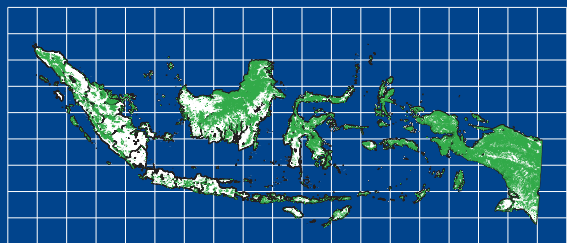
Peningkatan kesempatan kerja:



Peningkatan pendapatan:



KETERBATASAN SDA DAN LINGKUNGAN (TUTUPAN LAHAN)/ (DEVELOPMENT CONSTRAINTS)



Lingkungan

Keterbatasan Daya Dukung dan
Daya Tampung Sumber Daya
Alam (SDA) dan Sumber Daya
Ekonomi

STRATEGI DAN SASARAN UTAMA



Tutupan Hutan dan Lahan Gambut

- Pertahankan tutupan hutan primer pada luas **45-46 Juta Ha** dan hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (termasuk habitat spesies kunci) pada luas minimal **65 juta Ha**.
- Tingkatkan area restorasi lahan gambut seluas **1,5-2 juta Ha**.



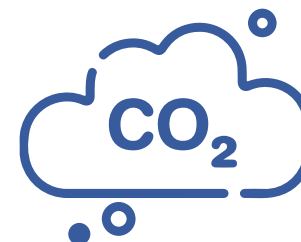
Perubahan Iklim dan Bencana

- Pertahankan **area pesisir** yang berpotensi abrasi.
- Prioritaskan **kawasan lindung** dan kawasan **rawan bencana** dalam RTRW.



Ketersediaan Air dan Energi

- Pertahankan ketersediaan air minimal **1000m³/kapita/tahun**.
- Tingkatkan proporsi energi baru terbarukan (EBT) minimal **19,5%**.
- Tingkatkan upaya penemuan sumber-sumber energi baru.



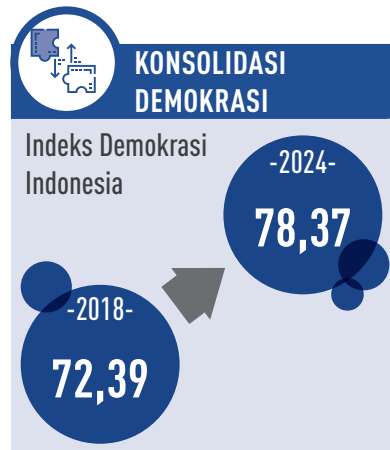
Tingkat Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

- Pertahankan **emisi GRK** di bawah **1,53 Gton CO₂e/tahun** pada tahun 2024 (penurunan 27% dari *baseline*).
- Pertahankan **intensitas emisi GRK** di bawah **334,82 ton CO₂e/milyarRp** pada tahun 2024 (penurunan 30% dari *baseline*).

KONDISI PERLU/PRASYARAT PEMBANGUNAN: POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN



Memperkuat Stabilitas Politik,
Hukum, Pertahanan, dan
Keamanan, serta Transformasi
Pelayanan Publik

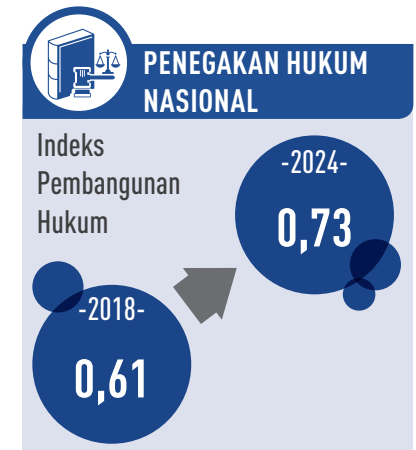


STRATEGI

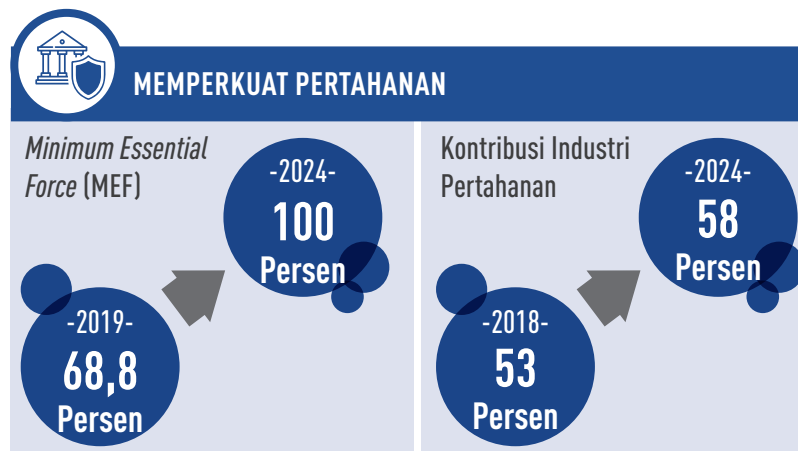
- Penataan Lembaga Demokrasi
- Hak Politik dan Kebebasan Sipil
- Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik



- Perundingan Perbatasan
- Perlindungan WNI
- Kerjasama Pembangunan Internasional

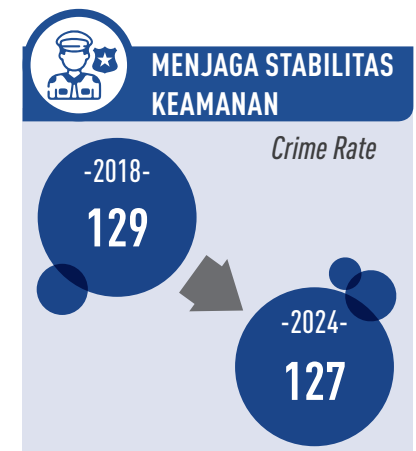


- Penataan Regulasi
- Hukum Ekonomi untuk Kemudahan Berusaha
- Keadilan Restoratif



STRATEGI

- Peningkatan *Minimum Essential Force (MEF)*
- Peningkatan Industri Pertahanan



- Keamanan Dalam Negeri
- Keamanan Siber
- Keamanan Laut

4

KAIDAH PELAKSANAAN

KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan RPJMN 2020-2024 disusun dengan memperkuat sinergi perencanaan dan penganggaran dengan tiga strategi utama:



ALOKASI PADA PRIORITAS

- Perkuat perencanaan penganggaran berbasis *money follow program*
- Tingkatkan integrasi pendanaan untuk prioritas khususnya Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)



KAPASITAS PENDANAAN

- Tingkatkan inovasi skema pendanaan (*creative financing*):
 - » Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU),
 - » Pembiayaan Inovatif Lainnya,
 - » Bauran pembiayaan (*blended finance*),
 - » Pembiayaan hijau (*green financing*), dan
 - » Hibah ke daerah berbasis hasil

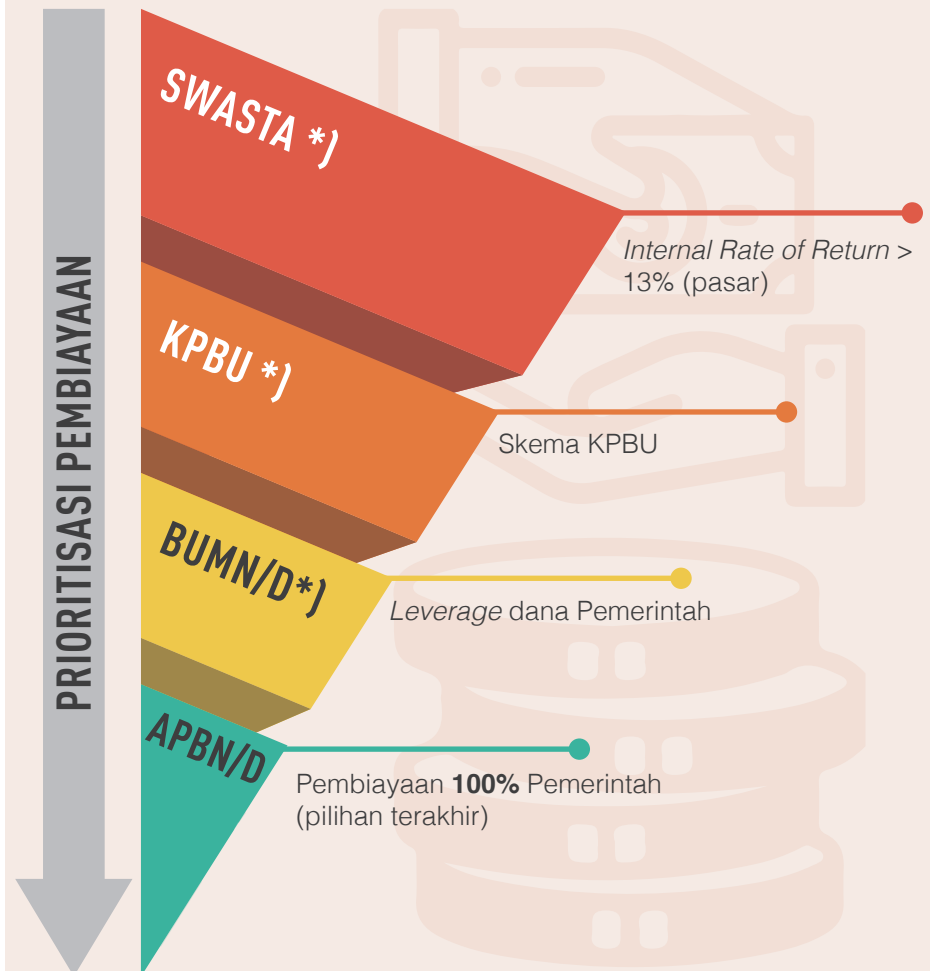


MEKANISME IMPLEMENTASI

- Perkuat penyusunan rencana program pembangunan dan pastikan kesiapan pelaksanaan

PARADIGMA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 2020-2024

Diutamakan Pembiayaan oleh Swasta dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)



KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan dimaksudkan untuk **membenahi kompleksitas fungsi** dan **kewenangan**, serta **meningkatkan daya saing global** melalui: (i) **penataan organisasi** (kejelasan tusi, kewenangan dan proses bisnis); (ii) **peningkatan transparansi, akuntabilitas dan kinerja**; dan (ii) mendorong institusi untuk **responsif dan kolaboratif**

PRINSIP KERANGKA KELEMBAGAAN



MENDUKUNG *OUTCOME* PEMBANGUNAN



TRANSPARAN, PARTISIPATIF, DAN AKUNTABEL



KEJELASAN PEMBAGIAN KEWENANGAN/URUSAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH



MENGEDEPANKAN KERJASAMA MULTI PIHAK YANG KOLABORATIF (*GOVERNMENT – NON GOVERNMENT*)

Penguatan Organisasi

Penggabungan Organisasi

Pembubaran Organisasi

Pembentukan Organisasi

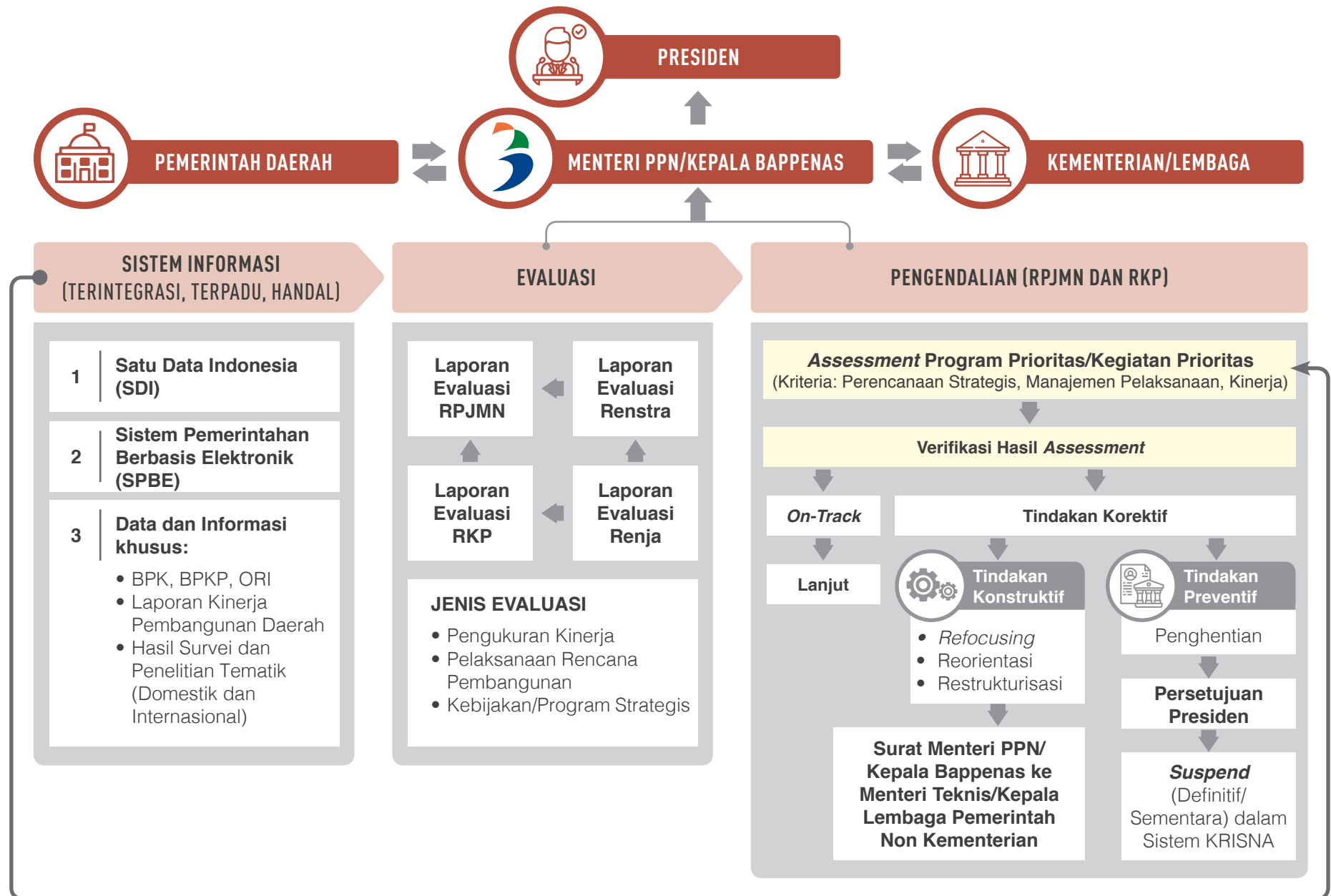


Peningkatan Peringkat Pilar Institusi
“Global Competitiveness Index”

Penekanan penguatan institusi pemerintah pada:
Transparansi, Kinerja sektor publik; & Respon pemerintah terhadap isu baru

<i>BASELINE</i> (2019)	TARGET 2024
51	30

KERANGKA EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN



5

PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)



No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
MENDORONG PERTUMBUHAN				
1	8 Destinasi Pariwisata Unggulan: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi, Likupang, dan Revitalisasi Bali	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 28 miliar USD (2024) Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 26 juta kedatangan (2024) 	Rp 138,9 <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 37 Swasta: Rp 94,3 KPBU Rp 0,4 PHLN: Rp 7,2 	a.l Kemenpar, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
2	9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter	<ul style="list-style-type: none"> Industrialisasi diluar Pulau Jawa, mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi diluar Pulau Jawa sebesar: Sumatera 5,6%; Nusa Tenggara 7,9%; Kalimantan 8,9%; Sulawesi 8,8%; Maluku 7,0%; Papua 8,1% (Tahun 2024) 	Rp 149,4 <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 7,6 Swasta: Rp 141 KPBU: Rp 0,8 	a.l KemenESDM, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
3	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5,8% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs). 	Rp 295,7 <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 281,7 (belanja K/L dan Non K/L) Swasta: Rp 14 	a.l Kementan, KKP, KemenBUMN, KemenKopUKM, Kemenperin, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
4	Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kontribusi industri dalam PDB menjadi 19,9%-21,1% 	Rp 103,2 <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 19,7 Swasta: Rp 82,6 KPBU Rp 0,9 	a.l Kemenperin, Kemendag, KPPU, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
5	Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi kesenjangan digital Menyediakan layanan internet cepat untuk mendukung digitalisasi sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan 	Rp 478 <ul style="list-style-type: none"> KPBU: Rp 3 APBN: Rp 37 Swasta: Rp 447 	a.l Kominfo, Kemenkes, Badan Usaha (BUMN/ Swasta), K/L terkait



No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
6	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pekerja berkeahlian menengah dan tinggi menjadi 50% (2024) Meningkatnya lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat kompetensi menjadi 2 juta orang (2024) 	Rp 332,5 (APBN dan Swasta)	a.l Kemenaker, Kemdikbud, Kemristekdikti
7	Pembangunan <i>Science Techno Park</i> (Optimalisasi <i>Triple Helix</i> di 4 Major Universitas)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapabilitas penciptaan inovasi dan produk inovasi nasional 	Rp 2,3 (APBN)	a.l Kemristekdikti & Perguruan Tinggi Negeri (UGM, IPB, ITB dan UI)
8	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	<ul style="list-style-type: none"> Menurunkan waktu tempuh Lampung – Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam 	Rp 309 • APBN: Rp 140,9 • Badan Usaha: Rp 168	a.l KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
9	KA Cepat Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)	Berkurangnya waktu tempuh: <ul style="list-style-type: none"> Jakarta – Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam Jakarta – Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit 	Rp 100 • APBN: Rp 58 • Badan Usaha: Rp 42	a.l Kemenhub, PUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
10	Kereta Api Angkutan Barang Makassar-Pare Pare	<ul style="list-style-type: none"> Terhubungnya Kawasan Industri dengan Pelabuhan Garongkong dan <i>Makassar New Port</i> Mengurangi beban angkutan barang di Jalan Nasional Lintas Barat Sulawesi 20-30% pada tahun 2045 (target 1,5 juta ton/tahun) 	Rp 13,1 • APBN: Rp.10,8 • Badan Usaha: Rp.2,3	a.l Kemenhub, KemenBUMN, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)



No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
11	Jaringan 7 Pelabuhan Utama Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja pelabuhan dengan standardisasi pelabuhan utama (nilai <i>turn round time</i> maksimum 24 jam) • Meningkatkan efisiensi rute pelayaran domestik dengan membentuk <i>loop</i> secara teratur menjadi 27% • Menurunkan biaya operasional pelabuhan sebesar 15%, menurunkan defisit neraca jasa sebesar 10% & biaya logistik sebesar 1,6% terhadap PDB (Rp 765 T selama 5 tahun) 	Rp 113 <ul style="list-style-type: none"> • APBN: Rp 2 • BUMN: Rp 34 • KPBU dan Swasta : Rp 77 	a.l Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
12	18 Waduk Multiguna	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,5 m³/detik dan pasokan listrik 2.438 MW • Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium 	Rp 201,5 <ul style="list-style-type: none"> • APBN: Rp 47,5 • KPBU: Rp 90 • Swasta : Rp 64 	a.l KemenPUPR, Kemen ESDM, Kemen LHK, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
13	Pembangkit Listrik 21.000 MW dan Transmisi 37.000 KMS	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pasokan untuk penggunaan listrik 1300 kWh per kapita • Menurunkan tingkat pemadaman listrik (SAIDI) di sistem utama maksimal menjadi 36 jam di 2024 	Rp 1.081,0 (Badan Usaha)	a.l KemenPUPR, Kementan, Kemen ESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
14	Pembangunan Energi Terbarukan B100 Berbasis Kelapa Sawit	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menjadi 19,5% 	Rp 101,1 <ul style="list-style-type: none"> • APBN: Rp 16,1 • BPDPKS: Rp 60 • Swasta : Rp 25 	a.l Kementan, KemenESDM, BPDPKS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
15	Pembangunan Dua Kilang Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah kapasitas produksi minyak menjadi 1.269 MBCD di tahun 2027; • Memperbaiki neraca perdagangan di sektor migas. 	Rp 441,7 (Badan Usaha)	a.l KemenESDM & Badan Usaha (BUMN/ Swasta)



No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
16	Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (1.700 KM)	<ul style="list-style-type: none"> Memenuhi kebutuhan gas bumi di sektor industri, pembangkit listrik, hingga kebutuhan jaringan gas rumah tangga dan komersial di Kalimantan; Mendukung penyediaan energi untuk calon ibukota negara; 	Rp 30 (Badan Usaha)	a.l. Kementerian ESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
17	Integrasi Pembangunan Wilayah Batam – Bintan	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pertumbuhan industri dan pariwisata Batam-Bintan 	Rp 28,04 <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 0,04 KPBU: Rp 18,5 Swasta: Rp 5,4 BUMN: Rp 4,1 	a.l BP Batam, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
18	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pangsa pasar pengguna angkutan umum setiap kota 30% 	Rp 156,1 <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 71,9 Badan Usaha: Rp 31,2 APBD: Rp 53 	a.l Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
19	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya <i>share</i> PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional Menigkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota didalam wilayah metropolitan 	Rp 274,5 (APBN, KPBU & Swasta)	KemenPUPR, Kemenhub, Kominfo, Kemen ESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
20	Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk Kab. Lebak (Maja), Kab. Bulungan (Tanjung Selor), Kota Tidore Kepulauan (Sofifi), Kota Sorong (Sorong) 	Rp 3,6 (APBN, Badan Usaha & Swasta)	a.l KemenPUPR, Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
21	Ibu Kota Negara (IKN)	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pembangunan KTI untuk pemerataan wilayah 	Rp 466 (APBN, KPBU & Swasta)	a.l Bappenas, KemenATR/ BPN, KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)



No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
22	Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa	<ul style="list-style-type: none"> Mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon Menurunkan waktu tempuh Semarang – Demak (1 jam menjadi 25 menit) 	Rp 50,9 <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 40,5 KPBU: Rp 10,4 	a.l. KemenPUPR, KemenESDM, KemenLHK, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
23	Pembentukan <i>National Cybersecurity Operation Center</i> (NSOC) dan 121 <i>Security Operation Center</i> (SOC) dan <i>Cyber Security Incident Response Team</i> (CSIRT)	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya angka serangan siber 	Rp 4,2	a.l. BSSN, Polri, Kemenhan/TNI, BIN
24	Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah	<ul style="list-style-type: none"> Penghematan subsidi LPG sebesar Rp. 297,6 M per tahun Mengurangi import LPG sebesar 603,720 Ribu ton per tahun 	Rp 64 <ul style="list-style-type: none"> Badan Usaha: Rp 10 APBN: Rp 8 KPBU: Rp 46 	a.l. KemenESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
25	Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara 	Rp 30,4 <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 27,2 » DAK: Rp 3,2 	a.l. KemenPUPR, Kemen LHK,
26	Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya infrastruktur berketahanan bencana dan pelayanan dasar di Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, Serta Kawasan Pesisir Selat Sunda 	Rp 50,7 <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 40,4 APBD: Rp 1,9 Hibah: Rp 3,2 Masyarakat dan Badan Usaha: Rp 5,2 	a.l. BNPB, Kemensos, KemenPUPR, Masyarakat, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)



No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
27	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kapasitas jumlah limbah B3 yang terolah hingga 26.880 ton/tahun Mengurangi 30% biaya transportasi pengelolaan limbah B3 	Rp 6,1 <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 2,1 KPBU: Rp 3 Swasta Murni: Rp 1 	a.l KLHK, Kemenkes, Kemen PUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
28	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kecepatan penyampaian peringatan dini bencana dari 5 menit menjadi 3 menit 	Rp 16,9 (APBN)	a.l BMKG, BNPB, KLHK, BPPT
29	Bekraf Creative District di Maja, Rangkasbitung, dan Karawang	<ul style="list-style-type: none"> Mendukung peningkatan investasi sebesar Rp 90 Triliun Penciptaan 2 Juta lapangan kerja baru dibidang ekonomi kreatif 	Rp 100,2 <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 0,2 K/L, PINA, KPBU: Rp 10 Swasta dan BUMN Rp 90 	a.l BEKRAF, KemenPUPR, BUMN/Swasta, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
30	Revitalisasi Tambak di Pantai Utara Jawa dan Lampung	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 Juta ton) meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun 	Rp 12	a.l KKP, KemenPUPR, Kemendag, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
31	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,2 miliar pada tahun 2024 	Rp 66	a.l KKP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
MENDORONG PEMERATAAN				
32	Jembatan Udara 115 Rute di Papua	<ul style="list-style-type: none"> Menurunkan disparitas harga bahan pokok di Wilayah Papua mencapai rata-rata sebesar 57,21% 	Rp 10,2 (APBN)	a.l Kemenhub,



No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
33	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas 	Rp 12 • APBN: Rp 12 » DAK: Rp 3,8	a.L KemenPUPR, Pemda
34	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah perbatasan, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua Mengurangi biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%. 	Rp 15,3 (APBN)	a.L KemenPUPR, Pemda,
35	Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke	<ul style="list-style-type: none"> Pusat perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya 	Rp 7,8 • APBN: Rp 7,4 • KPBU: Rp 0,4	a.l KemenPUPR, Kemenhub, Kemendag, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
36	Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di Wilayah Adat Laa Pago dan 11 Kabupaten di Wilayah Adat Domberay 	Rp 27,5 (APBN)	a.l KemenPUPR, Kemen ESDM, Kemendes, Kementan, Kementerian Desa PDTT, Kemenhub, Pemda
37	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> Menurunkan angka kematian Ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup Menurunnya prevalensi <i>stunting</i> hingga 19% 	Rp 229,5 • APBN: Rp 229,5 » DAK: Rp 21	a.l Kemenkes, BKKBN, KemenPUPR, Pemda
38	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100% 	Rp 157 • APBN: Rp 118,8 » DAK: Rp 71,8 » Hibah: Rp 14,4 • APBD: Rp 22,93 • KPBU: Rp 15,3	a.l KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ BUMD/Swasta)



No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Triliun)	Pelaksana
39	Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% 	Rp 177,5 <ul style="list-style-type: none"> APBN: Rp 94,8 » DAK: Rp 12 APBD: Rp 14,7 Masyarakat: Rp 64,3 Swasta: Rp 3,6 	a.l KemenPUPR, Kemenkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
40	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, aman dan terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan mencegah terbentuknya permukiman kumuh 	Rp 350,0 <ul style="list-style-type: none"> APBN, APBD & KPBU: Rp 100 BUMN/Swasta: Rp 250 	a.l Kemen PUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
41	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh (5T)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektifitas program bantuan sosial non tunai Mendorong cakupan layanan keuangan formal terutama masyarakat miskin dan rentan 	Rp 1.210 (APBN)	a.l Kemensos, Kemen Koinfo, BPS

* **Keterangan:** Daftar Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) dan indikasi pendanaannya akan dimutakhirkan hingga penetapan Peraturan Presiden tentang RPJMN 2020-2024

